

PEMERINTAH KABUPATEN
NIAS SELATAN



LAPORAN
KINERJA
2025

KATA PENGANTAR



SOKHIATULO LAIA
BUPATI NIAS SELATAN

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara transparan dan terukur mengenai capaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah berupaya secara optimal dalam mencapai target pembangunan daerah, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. Berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel di Kabupaten Nias Selatan.

Tetuk Dalam, 30 Januari 2026
BUPATI NIAS SELATAN,

SOKHIATULO LAIA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan	1
	C. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan ...	3
	D. Maksud dan Tujuan	5
	E. Sistematika Pelaporan	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	7
	A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	7
	B. Perjanjian Kinerja.....	22
	C. Perencanaan Anggaran.....	23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	27
	A. Pengukuran Kinerja	27
	B. Analisis Capaian Kinerja.....	28
	C. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah...	75
	D. Penghargaan Yang Diterima Kab. Nias Selatan.....	83
	E. Akuntabilitas Keuangan	85
BAB IV	PENUTUP.....	87

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Adapun rincian capaian kinerja adalah sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	Indeks Infrastruktur Daerah	33,15	30,89	93%
2	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	Indeks Pendidikan	57,75	58,48	100,7%
3	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani	Indeks Kesehatan	77,98	79,88	102,4
4	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah)	12,32	12,467	101,2%
		Persentase Kemiskinan	15,80	16,16	97,7%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,00	2,98	100,67%
5	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan	Indeks Reformasi Birokrasi	62	66,63	93%

	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,95	2,9	98%
		Indeks Pelayanan Publik	2,5	2,57	102,8%
7	Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,56	76,37*	142,58%

* = Capaian masih menggunakan data tahun sebelumnya.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 pada komponen belanja menunjukkan bahwa dari target yang ditetapkan sebesar **Rp1.541.253.528.663**, terealisasi sebesar **Rp1.257.849.522.134**. Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran belanja daerah mencapai sekitar 81,61%.



PENDAHULUAN



BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan kinerja disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bentuk akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan dalam menilai tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah dan sebagai bentuk nyata terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

I. Sejarah Singkat Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan berdiri pada tahun 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Nias, berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2003) tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan diresmikan di Medan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 2003, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2003 alm. T. Rizal Nurdin, Gubernur

Sumatera Utara pada saat itu, diangkat menjadi Pelaksana tugas Bupati Kabupaten Nias Selatan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan sebagai Pelaksana Harian oleh Drs. Nabari Ginting, Msi.

II. Kondisi Geografis

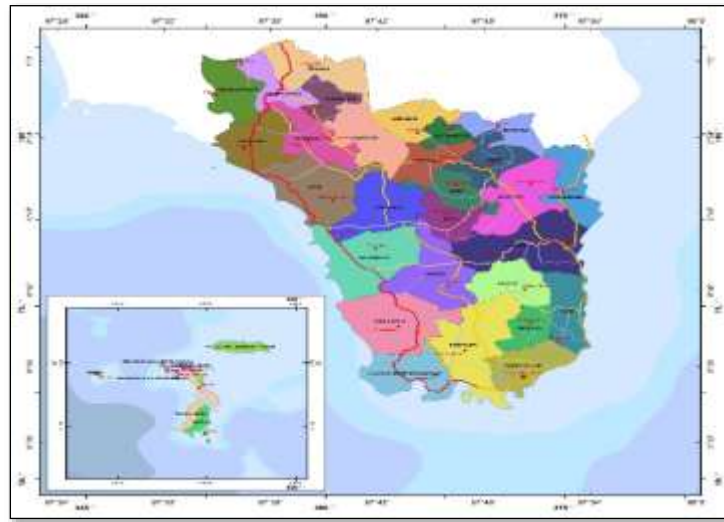
Kabupaten Nias Selatan secara astronomis terletak pada $0^{\circ} 33' 25''$ LS – $1^{\circ} 4' 5''$: U dan $97^{\circ} 25' 59''$ – $98^{\circ} 48' 29''$ BT. Letak geografis Kabupaten Nias Selatan di sebelah Barat pulau Sumatera dengan jarak ± 92 mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Teluk Dalam. Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak ± 120 km dari Kota Gunungsitoli ke Teluk Dalam (Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan). Letak pulau-pulau di wilayah Kabupaten Nias Selatan memanjang sejajar Pulau Sumatera. Dari gugusan pulau tersebut terdapat 4 (empat) pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Telo (18 km²) dan Pulau Pini (24,36 km²).

Kabupaten Nias Selatan yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Nias memiliki luas wilayah administrasi 6.902.505 Km² yang terdiri dari 104 (seratus empat buah pulau, 18 (delapan belas) kecamatan yang kemudian pada tahun 2012 jumlah kecamatan berkembang menjadi 35 kecamatan yang terdiri dari 2 kelurahan dan 459 Desa. Luas wilayah administrasi Kabupaten Nias Selatan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 adalah 2.487,98 Km². Sedangkan batas-batas wilayah kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai dan Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terbagi atas 35 Kecamatan, 459 Desa dan 2 Kelurahan.

Peta Wilayah Kabupaten Nias Selatan



III. Kondisi Geografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan di wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 mencapai 371.454.

C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Nias Selatan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya terbentuk dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD

- c. Inspektorat
- d. Badan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6) Dinas Sosial;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UKM;
 - 8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A;
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 13) Dinas Perhubungan;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 15) Dinas Penanaman Modal dan P2TSP;
 - 16) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
 - 17) Dinas Perpustakaan;
 - 18) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 19) Dinas Pertanian; dan
 - 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Teluk Dalam;
 - 2) Kecamatan Fanayama;
 - 3) Kecamatan Maniamolo;
 - 4) Kecamatan Aramo;
 - 5) Kecamatan Amandaraya;
 - 6) Kecamatan Lolowau;

- 7) Kecamatan Hilimegai;
- 8) Kecamatan Lolomatua;
- 9) Kecamatan Mazino;
- 10) Kecamatan Toma;
- 11) Kecamatan Lahusa;
- 12) Kecamatan Umbunasi;
- 13) Kecamatan Susua;
- 14) Kecamatan Mazo;
- 15) Kecamatan Pulau-pulau Batu;
- 16) Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur;
- 17) Kecamatan Hibala;
- 18) Kecamatan Ulunoyo;
- 19) Kecamatan Huruna;
- 20) Kecamatan O'ou;
- 21) Kecamatan Onohazumba;
- 22) Kecamatan Hilisalawa'ahe;
- 23) Kecamatan Ulususua;
- 24) Kecamatan Sidua'ori;
- 25) Kecamatan Somambawa;
- 26) Kecamatan Boronadu;
- 27) Kecamatan Simuk;
- 28) Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara;
- 29) Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat;
- 30) Kecamatan Tanah Masa;
- 31) Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- 32) Kecamatan Onolalu;
- 33) Kecamatan Gomo;
- 34) Kecamatan Idanotae; dan
- 35) Kecamatan Uluidanotae.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,

pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dapat menjadi sarana bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan Masyarakat). Kedua, Laporan Kinerja dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Adapun sistematika laporan kinerja adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum diantaranya latar belakang, gambaran umum Kabupaten Nias Selatan, kondisi umum Kabupaten Nias Selatan, permasalahan yang dihadapi, maksud dan tujuan, dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja tahun, Perjanjian Kinerja Perubahan, Perencanaan Anggaran dan Perencanaan Perubahan Anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian indikator sasaran dan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.



PERENCANAAN KINERJA



BAB II

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, serta program kerja Kepala Daerah, yaitu Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, dan Wakil Bupati Nias Selatan, Ir. Yusuf Nache, ST., MM. Keduanya telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, pada tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025.

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, yang mengusung tema "Penguatan Fondasi Transformasi", sebagai langkah awal menuju pencapaian visi jangka panjang, yaitu "Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan". Visi RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban. Visi ini mencerminkan tekad pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun ke depan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan kesejahteraan merata, memperkuat daya saing daerah melalui penguatan sumber daya manusia dan sektor unggulan, serta mendorong pembangunan inovatif agar lebih maju dan adaptif. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan dan lestari menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seluruh upaya

ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai keadaban yang mencerminkan moralitas dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Visi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 akan ditempuh melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat;
- 2) Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
- 3) Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
- 4) Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
- 6) Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

Misi		Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
M1	Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat	1	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	Indeks Infrastruktur Daerah (IID)	Skor	30,68	33,15	37,41	41,47	46,81	50,50	54,61
		1.1	Meningkatkan konektivitas wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pelayanan dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Skor	0,00	0,00	40	45	50	55	60
				Rasio konektivitas	Indeks	54,70	58,75	63,10	67,78	72,80	78,19	83,99
		1.2	Terwujudnya hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang tertata,	Persentase Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	0,00	12,50	12,91	13,32	13,73	14,14	14,55

Misi		Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				serta tersedianya gedung pemerintahan yang representatif untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat dan pelayanan publik yang berkualitas								
				Persentase Ketersediaan Gedung Pemerintahan	Persen	47,57	47,57	57,28	66,02	78,64	85,44	93,20
M2	Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri	2		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	Poin	57,62	57,75	57,88	58,01	58,14	58,27	58,40
		2.1		Meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga 13 tahun	Tahun	12,92	12,93	12,95	12,96	12,98	12,99	13,00
				Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,52	6,55	6,58	6,60	6,63	6,66	6,69
				Persentase satuan pendidikan yang								

Misi		Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :								
				Literasi Membaca								
				- SD	Persen	0,00	38,35	40,22	42,09	43,95	45,82	47,69
				- SMP	Persen	0,00	28,05	30,41	32,77	35,13	37,50	39,86
				Numerasi								
				- SD	Persen	0,00	39,20	40,65	42,11	43,56	45,01	46,46
				- SMP	Persen	0,00	31,14	32,98	34,81	36,65	38,48	40,32
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	1,52	1,52	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00
		2.2	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	0,00	31,99	36,99	44,49	51,99	59,49	66,99
		2.3	Meningkatkan jumlah lulusan SMA sederajat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	11,97	12,07	12,17	12,27	12,36	12,46	12,56
		2.4	Meningkatkan kompetensi pencari kerja	Rasio Kewirausahaan	Persen	0,00	0,18	0,40	0,63	0,85	1,08	1,30
				Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp (Juta) /Orang	22,23	22,98	23,73	24,48	25,23	25,98	26,73
M3	Memastikan Kemudahan	3	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	77,95	77,98	78,41	78,83	79,25	79,67	80,10

Misi		Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun						
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Akses Kesehatan Untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Yang Sehat Jasmani dan Rohani		untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani										
			3.1	Menurunkan prevalensi stunting pada balita sebagai upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak secara berkelanjutan	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	-	34,77	31,94	29,11	26,28	23,45	20,62
			3.2	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	Persen	-	85,00	87,60	90,20	92,80	95,40	98,00
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Nilai	n/a	82,00	85,00	89,00	90,00	92,00	95,00
					Umur Harapan Hidup	Tahun	71,77	71,79	72,04	72,30	72,55	72,80	73,06
					Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Skor	0,00	0,82	0,87	0,90	0,93	0,97	1,00
			3.3	Meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	48,64	49,60	50,50	51,40	52,30	53,10	54,00

Misi		Tujuan/ Sasaran			Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta ditopang oleh sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan									
					Indeks Pembangunan Gender	Persen	90,47	91,27	92,06	92,85	93,65	94,44	95,23
					Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49
					Indeks Perlindungan Anak	Poin	42,57	43,07	43,57	44,07	44,57	45,07	45,57
					Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
M4	Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal	4	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan		PDRB Perkapita ADHK	Juta Rupiah	12.325,28	12.326,42	12.327,56	12.328,70	12.329,84	12.330,98	12.332,12
			4.1	Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	0,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00

Misi		Tujuan/ Sasaran			Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks	0,00	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
					Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	0	60	70	80	90	100	110
					Indeks Ketahanan Pangan	Skor	66,29	66,90	67,52	68,13	68,75	69,36	69,98
			4.2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan mandiri berbasis sumber daya lokal	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	0,17	0,19	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26
					Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,19	9,20	9,22	9,23	9,24	9,25	9,27
					Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	Persen	20	25	25	25	30	30	35
					Persentase Peningkatan Investasi	Persen	80,00	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00	60,00
					Indeks Akses Keuangan Daerah	Skor	2,05	2,20	2,27	2,34	2,42	2,49	2,53
			4.3	Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis potensi lokal	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (ADHB)	Persen	2,27	2,28	2,29	2,30	2,30	2,31	2,32
M5	Mewujudkan tata kelola	5	Mewujudkan pemerintahan yang		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60,00	62/B	64/B	66/B	68/B	70/BB	72/BB

Misi		Tujuan/ Sasaran			Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat		bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.										
			5.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,90	2,95	3,01	3,12	3,22	3,33	3,44
					Indeks Pelayanan Publik	Skor	91,23	92,22	93,22	94,22	95,22	96,22	97,22
					Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	30,79	37,90	38,20	38,37	38,44	38,55	39,00
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
					Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	0,00	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Nilai SAKIP	Poin	54,15	60/B	62/B	64/B	66/B	68/B	70/BB
					Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Skor	0,00	83,00	83,60	84,20	84,80	85,40	86,00

Misi		Tujuan/ Sasaran			Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	80	80	81	82	83	84	85
					Indeks Profesionalitas ASN (PNS)	Skor	0,00	49,41	57,41	63,41	68,41	74,41	74,41
					Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	II	III	III	III	III	III	III
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Skor	0,00	76,50	78,50	81,00	83,50	86,00	88,50
					Indeks Desa Membangun (IDM)	Skor	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51
					Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Skor	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
					Indeks Reformasi Hukum	Nilai	0,00	53,00	53,40	53,80	54,20	54,60	55,00
M6	Mewujudkan ketahanan sosial	6	Peningkatan ketahanan sosial		Indeks Pemajuan Kebudayaan	Nilai	47,56	47,62	47,69	47,75	47,82	47,88	47,95

Misi		Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup		budaya dan pelestarian lingkungan hidup									
			6.1 Meningkatnya pelestarian budaya daerah yang berkelanjutan melalui penguatan identitas lokal dan pemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	0,00	55,00	56,13	57,25	58,38	59,50	60,63
			6.2 Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	53,56	53,56	53,56	53,57	53,57	53,57	53,57
			6.3 Meningkatnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berpijak pada Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor	-	90,00	90,40	90,80	91,20	91,60	92,00
				Indeks Demokrasi Indonesia	Kategori	0,00	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Skor	58,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Tabel 2.2
Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN 2025–2029(Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi 2025–2029			RPJMD Kab/Kota 2025–2029		
	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	2,97-4,15	5,33
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	24,03	59,82
3	Kontribusi PDRB Provinsi/Kab/Kota (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi/ Kab/ Kota (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota (%)	0,8	0,79
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96–7,46	2,823,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96–7,46	2,82–3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	15,90-15,50	11,90-11,50
5	Rasio Gini	0,303–0,305	0,287–0,291	Rasio Gini	0,303–0,305	0,287–0,291	Rasio Gini	0,260-0,240	0,206
6	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Pembangunan Manusia	67,39	75,01
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (TonCO ₂ eq)	1	16,88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (TonCO ₂ eq)	1	16,88	Penurunan Emisi GRK (TonCo2eq)	169.980,00	332.099,00
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	53,56	53,57
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27–5,56	4,74–5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27–5,56	4,74–5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00-2,80	1,70-1,50

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional IKU	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
1	Indeks Infrastruktur Daerah	Skor	Indeks komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang meliputi infrastruktur jalan, transportasi, permukiman, serta sarana prasarana pelayanan publik dalam mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Indeks Pendidikan	Poin	Indeks yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan pendidikan masyarakat yang dihitung berdasarkan komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan
3	Indeks Kesehatan	Poin	Indeks yang menggambarkan tingkat derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH) dan indikator kesehatan masyarakat lainnya.	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

4	PDRB Perkapita ADHK	Juta Rupiah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama yang menggambarkan rata-rata tingkat pendapatan riil masyarakat di Kabupaten Nias Selatan.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	Persentase Kemiskinan	Persen	Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan pada tahun tertentu.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Nilai yang menggambarkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang mencakup delapan area perubahan reformasi birokrasi sesuai ketentuan Kementerian PANRB.	Kementerian PANRB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Nilai yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.	Kementerian PANRB	Dinas Komunikasi dan Informatika

9	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Nilai yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik oleh Kementerian PANRB.	Kementerian PANRB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Indeks yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup daerah yang diukur melalui komponen kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	Indeks Infrastruktur Daerah	33,15
2	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	Indeks Pendidikan	57,75
3	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani	Indeks Kesehatan	77,98
4	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah)	12,32
		Persentase Kemiskinan	15,80
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,00
5	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Indeks Reformasi Birokrasi	62
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,95
		Indeks Pelayanan Publik	2,5
7	Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,56

C. PERENCANAAN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Tabel 2.5

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	620.460.250.236
2	Program Pengelolaan Pendidikan	153.553.851.750
3	Program Pengembangan Kurikulum	350.000.000
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60.000.000
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	102.129.794.890
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.713.480.750
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	72.560.000
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.597.151.800
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.203.440.000
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.966.142.000
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.121.324.000
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.700.300.000
13	Program Penataan Bangunan Gedung	9.806.540.000
14	Program Penyelenggaraan Jalan	65.818.332.623
15	Program Pengembangan Perumahan	23.050.000
16	Program Kawasan Permukiman	697.372.500
17	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	640.000.000
18	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.063.175.600
19	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	126.914.000
20	Program Penanggulangan Bencana	90.995.750
21	Program Pemberdayaan Sosial	5.730.000
22	Program Rehabilitasi Sosial	323.043.500
23	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	131.776.000

24	Program Penanganan Bencana	200.000.000
25	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	604.819.400
26	Program Hubungan Industrial	31.705.000
27	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	5.060.000
28	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	43.027.100
29	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	30.360.000
30	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	111.451.000
31	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	11.700.500
32	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	46.979.400
33	Program Pengembangan UMKM	482.894.000
34	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	85.685.000
35	Program Perlindungan Perempuan	59.701.000
36	program peningkatan kualitas keluarga	74.497.000
37	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	30.117.000
38	Program Pengendalian Penduduk	1.007.928.345
39	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.316.566.000
40	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.260.930.000
41	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	813.358.603
42	Program Penanganan Kerawanan Pangan	5.694.300
43	Program Pengawasan Keamanan Pangan	195.203.729
44	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	410.276.600
45	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.324.737.376
46	Program Pengelolaan Persampahan	69.968.000
47	Program Pendaftaran Penduduk	50.084.750
48	Program Pencatatan Sipil	50.084.750
49	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	222.771.500
50	Program Administrasi Pemerintahan Desa	213.536.601
51	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	750.000.000
52	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	603.670.000
53	Program Pengelolaan Pelayaran	4.199.330.950
54	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	620.712.000
55	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	854.547.000
56	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	54.000.000
57	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	19.500.000

58	Program pengembangan Iklim Penanaman Modal	86.253.700
59	Program Promosi Penanaman Modal	20.777.000
60	Program Pelayanan Penanaman Modal	60.792.000
61	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000
62	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	113.455.125
63	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	55.000.000
64	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	24.309.900
65	Program Pengembangan Kebudayaan	440.840.270
66	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	33.473.200
67	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	188.016.400
68	Program Pemasaran Pariwisata	6.113.459.740
69	Program Pembinaan Perpustakaan	590.256.600
70	Program Pengelolaan Arsip	206.731.900
71	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.171.185.533
72	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	269.052.468
73	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	37.505.106
74	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	301.501.000
75	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.207.715.000
76	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	109.980.000
77	Program Penyuluhan Pertanian	310.179.500
78	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	350.000.000
79	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90.549.000
80	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	51.616.500
81	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	232.925.900
82	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	36.656.000
83	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10.494.752.067
84	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.294.538.032
85	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.377.345.400
86	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	825.906.000
87	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	718.778.010
88	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	290.000.000
89	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	466.595.264.039
90	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	843.324.530

91	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.167.136.722
92	Program Kepegawaian Daerah	824.715.530
93	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	202.420.000
94	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.670.863.750
95	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	308.040.050
96	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	314.080.030
97	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	584.227.469
98	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.616.905.697
99	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	242.782.465
100	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.590.000
101	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	773.279.600
102	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.476.498.000
103	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7.790.000
104	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	510.447.000
105	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	500.009.000
TOTAL ANGGARAN		1.541.367.047.533

APBD Tahun 2025 mengalami pergeseran anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun total anggaran yang semula ditetapkan sebesar **1.541.367.047.533** berubah menjadi **1.518.416.134.804** atau berkurang sebesar **-22.837.393.858**. Dasar perubahan anggaran ini adalah kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Nias Selatan Tahun 2025 terhadap seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja tahun 2025 merupakan tahun ke-1 dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029. Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar **110%** yang diperoleh dari perhitungan rata-rata capaian dari 10 indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	Indeks Infrastruktur Daerah	33,15	30,89	93%
2	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	Indeks Pendidikan	57,75	58,48	101,26
3	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani	Indeks Kesehatan	77,98	79,88	102,4
4	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi	PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah)	12,32	12,467	101,2%
		Persentase Kemiskinan	15,80	16,16	97,7%

	berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,00	2,98	100,67%
5	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Indeks Reformasi Birokrasi	62	66,63	93%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,95	2,9	98%
		Indeks Pelayanan Publik	2,5	2,57	102,8%
7	Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,56	*76,37	142,58%

* = Capaian masih menggunakan data tahun sebelumnya.

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Analisa terhadap 7 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tujuan/Sasaran Strategis 1

Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik

Adapun capaian indikator kinerja dari tujuan/sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Indeks Infrastruktur Daerah	33,15	30,89	93%

Indeks Infrastruktur Daerah merupakan Indeks komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah yang meliputi infrastruktur jalan, transportasi, permukiman, serta sarana prasarana pelayanan publik dalam mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pencapaian Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan sebesar 33,15, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 30,89. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja masih berada di bawah target yang direncanakan. Namun demikian, nilai realisasi tersebut tetap mencerminkan adanya upaya pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Selisih antara target dan realisasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, kendala geografis, kondisi cuaca, maupun hambatan teknis dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Ke depan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor penghambat tersebut agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan capaian indeks infrastruktur daerah dapat lebih mendekati bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Indeks Infrastruktur Tahun 2025 ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2024, mengingat Indeks Infrastruktur ini merupakan indikator kinerja pada RPJMD Periode 2025-2029, sedangkan pada tahun 2024 masih menggunakan RPJMD Periode 2021-2026 yang didalamnya Indeks Infrastruktur tidak termasuk sebagai indikator kinerja. Selain itu, tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan sehingga dibutuhkan penyesuaian pencapaian kinerja dari periode pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan yang sedang berjalan hingga saat ini.

➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap tercapainya realisasi Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar 30,89 antara lain:

1. Komitmen pemerintah daerah

Adanya keseriusan dan konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur melalui perencanaan program dan pengalokasian anggaran yang relatif memadai.

2. Dukungan pendanaan

Ketersediaan sumber pembiayaan, baik dari APBD maupun transfer dari pemerintah pusat, turut membantu pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.

3. Pelaksanaan proyek yang berkelanjutan

Proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan dapat tetap berjalan, termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta fasilitas dasar lainnya.

4. Koordinasi antar perangkat daerah

Kerja sama yang cukup baik antar instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

5. Partisipasi masyarakat

Dukungan masyarakat dalam bentuk penerimaan terhadap proyek pembangunan dan keterlibatan dalam menjaga hasil pembangunan.

6. Pemanfaatan sumber daya lokal

Penggunaan tenaga kerja lokal dan material yang tersedia di daerah membantu mempercepat pelaksanaan proyek.

7. Pengawasan dan evaluasi

Adanya mekanisme monitoring yang memastikan proyek berjalan sesuai rencana, sehingga meminimalkan penyimpangan.

➤ **Faktor Penghambat**

Beberapa faktor penghambat yang menyebabkan realisasi Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Nias Selatan (30,89) belum mencapai target (33,15) antara lain:

1. Keterbatasan anggaran

Alokasi dana yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur, sehingga beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara optimal atau harus ditunda.

2. Kondisi geografis yang menantang

Wilayah Nias Selatan memiliki topografi yang cukup sulit, seperti perbukitan dan daerah terpencil, yang menyulitkan akses distribusi material serta pelaksanaan proyek.

3. Cuaca dan faktor alam

Curah hujan tinggi dan potensi bencana alam dapat menghambat proses konstruksi serta memperlambat penyelesaian pekerjaan.

4. Keterbatasan aksesibilitas

Infrastruktur dasar yang belum merata justru menjadi kendala dalam pembangunan lanjutan, terutama untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.

5. Kapasitas teknis dan sumber daya manusia

Keterbatasan tenaga ahli atau keterampilan teknis tertentu dapat memengaruhi kualitas dan kecepatan pelaksanaan proyek.

6. Permasalahan dalam proses pengadaan

Kendala administrasi, keterlambatan lelang, atau proses pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu dapat menghambat dimulainya kegiatan.

7. Koordinasi yang belum optimal

Sinkronisasi antar instansi atau antara pemerintah pusat dan daerah yang belum sepenuhnya efektif dapat menyebabkan keterlambatan atau tumpang tindih program.

8. Pengawasan dan manajemen proyek

Pengendalian proyek yang belum maksimal berpotensi menimbulkan keterlambatan pekerjaan atau hasil yang tidak sesuai target.

Faktor-faktor tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar ke depan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat lebih efektif dan capaian indikator bisa meningkat sesuai target.

➤ **Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target ke depan**

Untuk meningkatkan capaian Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Nias Selatan agar dapat mencapai bahkan melampaui target, diperlukan sejumlah upaya strategis yang terencana dan berkelanjutan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan

Menyusun perencanaan yang lebih realistis, berbasis data, serta mempertimbangkan kondisi geografis dan kapasitas daerah, sehingga target yang ditetapkan lebih terukur dan dapat dicapai.

2. Optimalisasi anggaran

Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta memprioritaskan program infrastruktur yang memiliki dampak besar. Selain itu, perlu mendorong diversifikasi sumber pendanaan, seperti kerja sama dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta.

3. Percepatan proses pengadaan

Menyederhanakan dan mempercepat mekanisme pengadaan barang dan jasa, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar pelaksanaan proyek dapat dimulai lebih awal.

4. Peningkatan kapasitas SDM

Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur dan tenaga teknis agar mampu mengelola proyek infrastruktur secara profesional dan tepat waktu.

5. Pemanfaatan teknologi

Menggunakan teknologi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek (misalnya sistem monitoring digital) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

6. Penguatan koordinasi antar pihak

Meningkatkan sinergi antara perangkat daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan program berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

7. Manajemen proyek yang lebih ketat

Menerapkan pengawasan dan pengendalian yang lebih disiplin, termasuk evaluasi berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan standar kualitas.

8. Peningkatan aksesibilitas wilayah terpencil

Memprioritaskan pembangunan di daerah yang sulit dijangkau untuk membuka konektivitas, sehingga pelaksanaan proyek berikutnya menjadi lebih mudah.

9. Mitigasi risiko dan adaptasi terhadap kondisi alam

Menyusun strategi antisipasi terhadap cuaca ekstrem dan potensi bencana agar proyek tetap dapat berjalan dengan gangguan minimal.

10. Pelibatan masyarakat dan stakeholder

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan menjaga hasil pembangunan, sehingga keberlanjutan infrastruktur dapat terjamin.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan capaian indeks infrastruktur daerah di masa mendatang tidak hanya mencapai target, tetapi juga berpotensi melampauinya.

Tujuan/Sasaran Strategis 2

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pendidikan	57,75	58,48	101,26

Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Dengan target sebesar **57,75**, realisasi yang dicapai adalah **58,48**, sehingga terdapat selisih kinerja sebesar **0,73 poin** atau mencapai sekitar **101,26 persen** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan berjalan dengan baik dan mampu melampaui ekspektasi yang direncanakan.

Pencapaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam dimensi utama pembentuk indeks pendidikan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan pendidikan semakin meningkat, serta keberlanjutan pendidikan bagi penduduk usia sekolah cenderung semakin baik. Dengan kata lain, semakin banyak penduduk yang dapat mengenyam pendidikan dalam durasi yang lebih panjang.

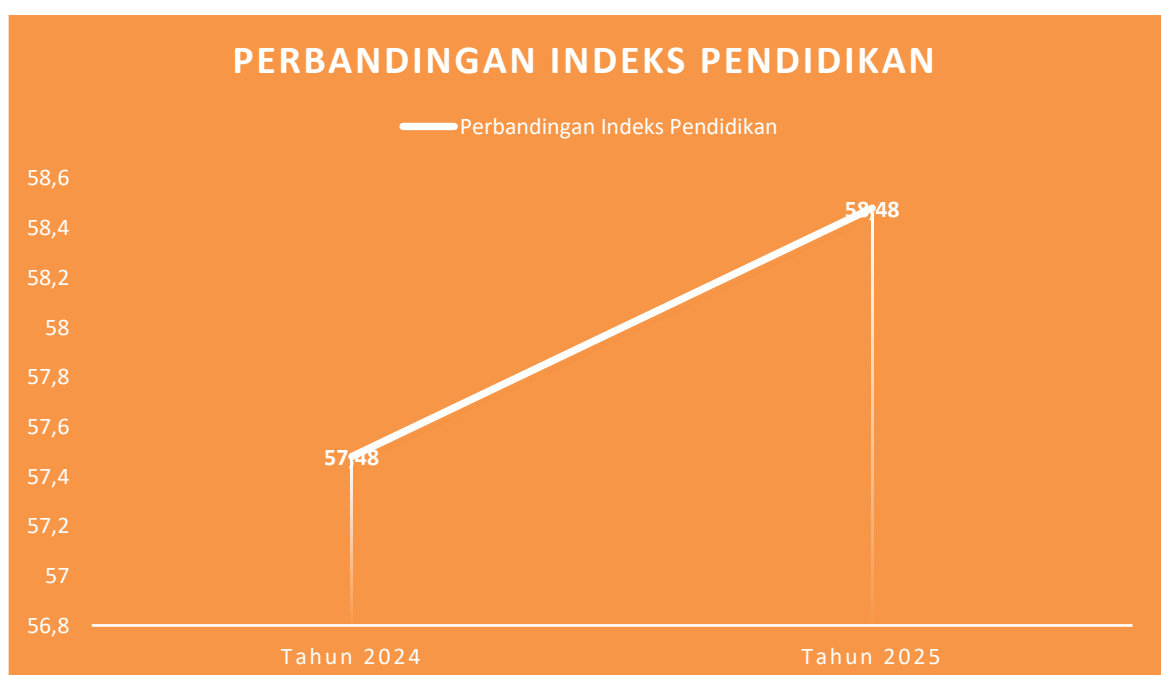
Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor pendidikan, seperti perluasan akses layanan pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan masyarakat. Capaian yang melampaui target juga mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan telah memberikan hasil yang efektif.

Dari sisi manfaat, peningkatan indeks pendidikan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan dan keterampilan

yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Selain itu, peningkatan pendidikan juga berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial, seperti meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan, partisipasi dalam pembangunan, serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dalam jangka panjang, capaian ini turut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nias Selatan, mengingat pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam penghitungan IPM. Dengan demikian, keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan semata, tetapi juga mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa peningkatan indeks pendidikan tidak hanya berfokus pada kuantitas atau lama pendidikan, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk kualitas tenaga pendidik, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Secara keseluruhan, pencapaian indeks pendidikan yang melampaui target menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun tetap memerlukan penguatan dari aspek kualitas agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.



➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Targer Kinerja Indeks Pendidikan**

Keberhasilan pencapaian indeks pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang melampaui target tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang saling berkontribusi secara sinergis. Faktor-faktor tersebut mencerminkan keberhasilan intervensi kebijakan, dukungan masyarakat, serta kondisi pendukung lainnya dalam sektor pendidikan.

Salah satu faktor utama adalah meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan. Hal ini ditandai dengan semakin tersedianya fasilitas pendidikan, baik dari sisi jumlah satuan pendidikan maupun jangkauan layanan hingga ke wilayah yang lebih terpencil. Akses yang lebih baik memungkinkan masyarakat, khususnya anak usia sekolah, untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih luas.

Selain itu, dukungan program pemerintah daerah juga menjadi faktor penting. Berbagai program seperti bantuan pendidikan, penyediaan perlengkapan sekolah, serta kebijakan yang mendorong wajib belajar telah membantu mengurangi hambatan ekonomi masyarakat dalam mengakses pendidikan. Intervensi ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah.

Faktor berikutnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Perubahan pola pikir masyarakat yang semakin menghargai pendidikan sebagai investasi masa depan turut mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah dalam jangka waktu yang lebih lama. Dukungan keluarga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak.

Di sisi lain, ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik yang semakin baik juga memberikan kontribusi terhadap capaian ini. Kehadiran guru di berbagai wilayah, termasuk daerah yang sebelumnya kekurangan tenaga pendidik, membantu meningkatkan proses pembelajaran dan menjaga keberlangsungan kegiatan pendidikan.

Faktor pendukung lainnya adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, penyediaan fasilitas belajar, serta dukungan infrastruktur dasar turut menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi siswa. Tidak kalah penting, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi ini memperkuat pelaksanaan program pendidikan sehingga lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian indeks pendidikan ini merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, baik dari sisi kebijakan, infrastruktur, maupun perubahan sosial masyarakat. Ke depan, faktor-faktor pendukung ini perlu terus diperkuat agar peningkatan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

➤ **Faktor Penghambat yang berpotensi menggagalkan pencapaian target kinerja Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan**

Meskipun capaian indeks pendidikan Kabupaten Nias Selatan telah melampaui target, masih terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menghambat bahkan menyebabkan tidak tercapainya target kinerja pada periode mendatang apabila tidak diantisipasi dengan baik. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil. Kondisi geografis yang menantang, seperti jarak antarpermukiman yang jauh serta keterbatasan infrastruktur transportasi, dapat menyulitkan peserta didik untuk mengakses layanan pendidikan secara optimal. Hal ini berpotensi meningkatkan angka ketidakhadiran maupun putus sekolah.

Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan ekonomi, sehingga anak-anak berpotensi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena harus membantu perekonomian keluarga. Faktor ini secara langsung memengaruhi rata-rata lama sekolah. Faktor berikutnya adalah keterbatasan dan ketimpangan distribusi tenaga pendidik. Di beberapa wilayah, masih terdapat kekurangan guru atau ketidaksesuaian kualifikasi tenaga pendidik. Kondisi ini dapat berdampak pada kualitas proses pembelajaran dan menurunkan minat belajar peserta didik.

Di sisi lain, kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata juga menjadi kendala. Masih adanya sekolah dengan fasilitas yang terbatas atau kurang layak dapat menghambat proses belajar mengajar serta menurunkan kenyamanan dan motivasi siswa. Selanjutnya, rendahnya kualitas pembelajaran juga menjadi faktor risiko. Meskipun lama sekolah meningkat, namun jika tidak diiringi dengan kualitas pengajaran yang baik, maka peningkatan indeks pendidikan menjadi kurang optimal dan berpotensi stagnan di masa depan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Pola pikir yang belum sepenuhnya mendukung pendidikan jangka panjang dapat menyebabkan anak-anak tidak menyelesaikan pendidikan secara tuntas. Selain itu, terbatasnya anggaran pendidikan daerah juga dapat memengaruhi keberlanjutan program-program peningkatan pendidikan. Keterbatasan fiskal berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, serta pelaksanaan program pendukung lainnya.

Terakhir, dampak faktor eksternal seperti bencana alam, kondisi kesehatan masyarakat, atau situasi darurat lainnya juga dapat mengganggu proses pembelajaran dan menurunkan capaian indikator pendidikan. Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan kebijakan yang adaptif. Upaya mitigasi yang tepat akan sangat menentukan keberlanjutan peningkatan indeks pendidikan serta pencapaian target kinerja di masa yang akan datang.

➤ **Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan**

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja indeks pendidikan serta mengurangi berbagai risiko penghambat, diperlukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dari pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Salah satu upaya utama adalah peningkatan akses pendidikan yang merata. Pemerintah daerah perlu terus memperluas jangkauan layanan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, melalui pembangunan unit sekolah baru, penyediaan transportasi sekolah, maupun pengembangan model

pembelajaran alternatif. Dengan demikian, seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Selain itu, penguatan program bantuan pendidikan menjadi langkah strategis untuk mengatasi kendala ekonomi masyarakat. Bantuan seperti beasiswa, subsidi perlengkapan sekolah, dan dukungan biaya pendidikan perlu ditingkatkan dan tepat sasaran agar dapat menekan angka putus sekolah dan mendorong keberlanjutan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Upaya berikutnya adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, serta pemerataan distribusi guru, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Guru yang berkualitas akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan.

Di sisi lain, perbaikan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan juga perlu menjadi prioritas. Penyediaan ruang kelas yang layak, fasilitas belajar yang memadai, serta dukungan infrastruktur dasar akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan meningkatkan motivasi peserta didik. Selanjutnya, diperlukan peningkatan kualitas pembelajaran dengan menekankan pada metode pengajaran yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa. Tidak hanya fokus pada lama sekolah, tetapi juga pada hasil belajar yang berkualitas.

Upaya penting lainnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar lebih mendukung pendidikan anak hingga jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, penguatan perencanaan dan penganggaran pendidikan juga menjadi faktor kunci. Alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran akan memastikan keberlanjutan program-program pendidikan serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh.

Tidak kalah penting, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta perlu terus ditingkatkan. Sinergi ini akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program serta memperluas

dukungan terhadap pembangunan pendidikan. Terakhir, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi yang baik akan membantu mengidentifikasi permasalahan sejak dini serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Secara keseluruhan, upaya peningkatan indeks pendidikan tidak hanya berfokus pada perluasan akses, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan keberlanjutan. Dengan langkah yang komprehensif dan konsisten, diharapkan pencapaian kinerja indeks pendidikan Kabupaten Nias Selatan dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Tujuan/Sasaran Strategis

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kesehatan	77,98	79,88	102,4%

Capaian kinerja Indeks Kesehatan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan target yang ditetapkan sebesar 77,98, realisasi yang berhasil dicapai adalah 79,88, sehingga terdapat selisih positif sebesar 1,90 poin. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai sekitar 102,44 persen dari target, yang mengindikasikan bahwa kinerja sektor kesehatan telah melampaui ekspektasi yang direncanakan.

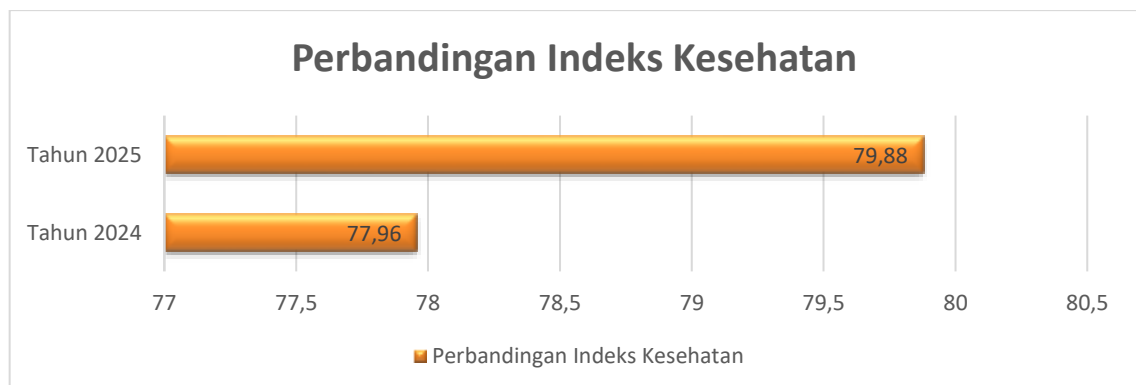
Pencapaian ini mencerminkan adanya peningkatan pada berbagai indikator pembentuk indeks kesehatan, yang umumnya meliputi angka harapan hidup, derajat kesehatan masyarakat, serta akses dan kualitas layanan kesehatan. Kenaikan indeks ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Nias Selatan semakin membaik, baik dari sisi pencegahan penyakit, penanganan kesehatan, maupun kualitas hidup secara umum.

Keberhasilan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program dan intervensi di bidang kesehatan telah berjalan secara efektif. Upaya seperti peningkatan

layanan fasilitas kesehatan, perluasan cakupan pelayanan kesehatan dasar, penguatan program promotif dan preventif, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan turut berkontribusi terhadap capaian ini. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat juga menjadi faktor pendukung yang signifikan.

Dari sisi manfaat, peningkatan indeks kesehatan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Kondisi kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas penduduk, karena masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara optimal. Selain itu, beban pengeluaran rumah tangga untuk pengobatan dapat berkurang, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam jangka panjang, peningkatan kesehatan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut, capaian ini turut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukannya. Dengan meningkatnya indeks kesehatan, maka kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan juga mengalami perbaikan.

Meskipun demikian, capaian ini tetap perlu diiringi dengan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Tantangan seperti pemerataan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular perlu terus menjadi perhatian. Secara keseluruhan, pencapaian Indeks Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 yang melampaui target menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui kebijakan yang berkelanjutan dan adaptif.



➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian Indeks Kesehatan Kabupaten Nias Selatan yang melampaui target merupakan hasil dari berbagai faktor pendukung yang bekerja secara terpadu dan berkelanjutan. Faktor-faktor ini mencerminkan efektivitas kebijakan, program, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kesehatan. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pusku, dan layanan kesehatan lainnya yang semakin menjangkau masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, telah mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Selain itu, penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif juga menjadi faktor kunci. Berbagai program seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, pencegahan stunting, serta kampanye pola hidup bersih dan sehat telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Faktor berikutnya adalah peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan. Kehadiran tenaga medis dan paramedis yang lebih memadai, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pembinaan, turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di sisi lain, dukungan program jaminan kesehatan juga memberikan kontribusi signifikan. Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat menjadi lebih mudah mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi, sehingga mendorong peningkatan pemanfaatan fasilitas kesehatan.

Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi faktor penting. Peningkatan kualitas fasilitas, ketersediaan alat kesehatan, serta dukungan infrastruktur dasar telah menciptakan layanan kesehatan yang lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, meningkatnya kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat turut berperan besar. Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan cenderung lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, pola makan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Faktor pendukung lainnya adalah sinergi antar pemangku

kepentingan, baik pemerintah daerah, tenaga kesehatan, maupun masyarakat. Kolaborasi yang baik ini memastikan bahwa program-program kesehatan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Tujuan/Sasaran Strategis

Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah)	12,32	12,467	101,2%
Persentase Kemiskinan	15,80	16,16	97,7%
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,00	2,98	100,67%

Tujuan/Sasaran Strategi “Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja antara lain :

1. PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)

Capaian kinerja PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Nias Selatan menunjukkan hasil yang positif pada periode pelaporan. Dengan target sebesar 12,32 juta rupiah, realisasi yang dicapai adalah 12,467 juta rupiah, sehingga terdapat selisih sebesar 0,147 juta rupiah. Secara persentase, capaian ini mencapai sekitar 101,2 persen dari target yang telah ditetapkan, yang berarti kinerja ekonomi daerah berhasil melampaui ekspektasi.

Pencapaian ini mencerminkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan riil masyarakat, karena PDRB per kapita ADHK mengukur nilai output ekonomi per penduduk dengan menghilangkan pengaruh inflasi. Dengan demikian, kenaikan indikator ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat secara nyata. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Nias Selatan mengalami perkembangan yang cukup baik. Beberapa sektor ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya, turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai tambah daerah.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi ini juga mencerminkan adanya perbaikan dalam produktivitas masyarakat.

Dari sisi manfaat, peningkatan PDRB per kapita memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, peningkatan daya beli juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Dalam jangka panjang, capaian ini turut memperkuat struktur ekonomi daerah dan meningkatkan daya tarik investasi. Kondisi ekonomi yang membaik akan memberikan kepercayaan bagi investor untuk menanamkan modalnya, sehingga membuka peluang kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa peningkatan PDRB per kapita belum tentu mencerminkan pemerataan pendapatan. Masih terdapat kemungkinan adanya kesenjangan antar kelompok masyarakat atau antar wilayah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ke depan perlu tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek pemerataan dan inklusivitas. Secara keseluruhan, pencapaian PDRB per kapita ADHK Kabupaten Nias Selatan yang melampaui target menunjukkan kinerja ekonomi yang baik dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ke depan, upaya peningkatan perlu terus diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, dan merata.

Keberhasilan pencapaian kinerja PDRB per kapita ADHK yang melampaui target merupakan hasil dari berbagai faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan produktivitas masyarakat. Salah satu faktor utama adalah pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan. Sektor seperti pertanian, perdagangan, dan jasa yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah mengalami perkembangan yang cukup stabil. Peningkatan produksi dan aktivitas ekonomi pada sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap total PDRB.

Selain itu, meningkatnya produktivitas masyarakat juga menjadi faktor penting. Produktivitas yang lebih baik mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa yang lebih tinggi, sehingga berdampak langsung pada peningkatan nilai tambah ekonomi per kapita. Faktor berikutnya adalah stabilitas ekonomi daerah. Kondisi ekonomi yang relatif stabil, termasuk terkendalinya inflasi dan terjaganya daya beli masyarakat, turut mendukung pertumbuhan ekonomi riil. Karena indikator yang digunakan adalah ADHK (harga konstan), maka pertumbuhan yang terjadi benar-benar mencerminkan peningkatan volume produksi, bukan sekadar kenaikan harga.

Di sisi lain, dukungan kebijakan pemerintah daerah juga berperan penting. Berbagai program pembangunan ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian, serta peningkatan infrastruktur ekonomi, telah membantu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan investasi, baik dari pemerintah maupun swasta, juga menjadi faktor pendukung. Investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur, usaha produktif, dan sektor jasa turut memperluas lapangan kerja serta meningkatkan output ekonomi daerah.

Selanjutnya, perbaikan infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan sarana distribusi turut memperlancar arus barang dan jasa. Hal ini berdampak pada efisiensi ekonomi dan peningkatan konektivitas antarwilayah, yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang lebih terdidik dan sehat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam bekerja dan berinovasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Selain itu, meningkatnya konsumsi masyarakat juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Daya beli yang membaik mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, yang kemudian memicu peningkatan produksi. Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian PDRB per kapita ADHK ini merupakan hasil dari sinergi berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan sektor ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga peningkatan produktivitas

masyarakat. Ke depan, faktor-faktor ini perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat lebih berkelanjutan dan merata.

Meskipun capaian PDRB per kapita ADHK menunjukkan kinerja yang baik, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menghambat bahkan menurunkan pencapaian kinerja apabila tidak diantisipasi secara tepat. Salah satu faktor utama adalah rendahnya produktivitas sektor ekonomi utama. Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti pertanian tradisional yang masih rentan terhadap cuaca dan memiliki nilai tambah rendah, dapat menghambat pertumbuhan PDRB jika tidak diiringi dengan modernisasi dan diversifikasi usaha. Selain itu, keterbatasan infrastruktur ekonomi juga menjadi kendala signifikan. Kondisi jalan yang belum optimal, keterbatasan sarana transportasi, serta akses distribusi yang kurang lancar dapat menghambat arus barang dan jasa, sehingga menurunkan efisiensi dan produktivitas ekonomi daerah.

Faktor berikutnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum merata dapat membatasi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi. Di sisi lain, terbatasnya investasi juga menjadi penghambat penting. Kurangnya minat investor akibat keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, atau faktor lainnya dapat menghambat pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi geografis dan keterisolasian wilayah juga menjadi tantangan tersendiri. Letak wilayah yang relatif terpencil dapat meningkatkan biaya logistik, menghambat konektivitas, serta membatasi akses pasar, yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, fluktuasi harga komoditas dapat memengaruhi kinerja ekonomi, terutama jika perekonomian daerah bergantung pada komoditas tertentu. Penurunan harga komoditas dapat berdampak langsung pada pendapatan masyarakat dan nilai tambah ekonomi.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah rendahnya daya beli masyarakat. Jika pendapatan masyarakat stagnan atau menurun, maka konsumsi juga

akan melemah, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kesenjangan pembangunan antarwilayah juga dapat menjadi penghambat. Ketimpangan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak merata, sehingga peningkatan PDRB per kapita tidak optimal secara keseluruhan.

Tidak kalah penting, risiko eksternal seperti bencana alam, perubahan kebijakan nasional, maupun kondisi ekonomi global juga dapat memengaruhi kinerja ekonomi daerah secara signifikan. Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Upaya peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor ekonomi unggulan menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan pencapaian kinerja PDRB per kapita ADHK di masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PDRB per kapita ADHK serta meminimalkan berbagai faktor penghambat, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan perlu melaksanakan strategi pembangunan ekonomi yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah penguatan sektor ekonomi unggulan daerah. Pemerintah perlu terus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa melalui modernisasi alat produksi, penerapan teknologi tepat guna, serta peningkatan nilai tambah produk lokal. Upaya hilirisasi hasil produksi juga penting agar tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Selain itu, peningkatan infrastruktur ekonomi menjadi prioritas utama. Pembangunan dan perbaikan jalan, pelabuhan, serta sarana transportasi dan distribusi sangat penting untuk memperlancar arus barang dan jasa. Infrastruktur yang baik akan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Upaya berikutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah daerah perlu memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan kerja, serta program kewirausahaan agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih produktif, inovatif, dan mampu bersaing di pasar kerja maupun usaha mandiri.

Selanjutnya, peningkatan investasi daerah menjadi strategi penting. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, serta promosi potensi daerah untuk menarik investor, baik dari dalam maupun luar daerah. Di sisi lain, penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif juga menjadi fokus strategis. Dukungan berupa akses permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, serta perluasan akses pasar dapat membantu UMKM menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Strategi berikutnya adalah pemerataan pembangunan antarwilayah. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga menjangkau daerah terpencil agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan merata. Selain itu, digitalisasi ekonomi dan pelayanan publik juga menjadi langkah penting. Pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi usaha, memperluas pasar, serta mempercepat layanan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Tidak kalah penting, penguatan ketahanan ekonomi daerah perlu dilakukan untuk menghadapi risiko eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim. Diversifikasi ekonomi menjadi kunci agar daerah tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja. Terakhir, penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan seluruh program pembangunan ekonomi berjalan efektif dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, strategi ini diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, berkelanjutan, dan merata, sehingga dapat meningkatkan PDRB per kapita ADHK sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

2. Persentase Kemiskinan

Capaian kinerja persentase kemiskinan Kabupaten Nias Selatan menunjukkan bahwa realisasi masih berada di atas target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 15,80%, realisasi yang dicapai adalah 16,16%, sehingga terdapat selisih sebesar 0,36 poin persentase. Kondisi ini

menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan belum mencapai target yang diharapkan, atau dengan kata lain capaian kinerja masih di bawah ekspektasi (*under performance*). Karena indikator kemiskinan bersifat negatif (semakin kecil semakin baik), maka realisasi yang lebih tinggi dari target mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan masih lebih besar dibandingkan sasaran yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan.

Kondisi tersebut dapat mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berdampak merata ke seluruh lapisan penduduk. Sebagian masyarakat masih berada pada kondisi rentan miskin, yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, keterampilan, serta layanan dasar lainnya. Selain itu, faktor struktural seperti kondisi geografis wilayah, keterisolasian beberapa daerah, serta keterbatasan infrastruktur ekonomi dan sosial juga turut memengaruhi lambatnya penurunan angka kemiskinan. Ketergantungan masyarakat pada sektor ekonomi berproduktivitas rendah, seperti pertanian tradisional, juga dapat menjadi faktor yang memperlambat peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari sisi kebijakan, capaian ini menunjukkan perlunya penguatan program penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Intervensi tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, capaian persentase kemiskinan Kabupaten Nias Selatan yang masih berada di atas target menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan masih cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pemberdayaan agar penurunan kemiskinan dapat tercapai secara lebih optimal di masa mendatang.

➤ **Faktor Penghambat/Kegagalan Pencapaian Target Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan**

Tidak tercapainya target penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural maupun kontekstual, yang saling berkaitan dan berdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor utama adalah terbatasnya lapangan kerja produktif. Sebagian besar tenaga kerja masih terserap pada sektor informal dan sektor berproduktivitas rendah, seperti pertanian tradisional, sehingga pendapatan masyarakat cenderung tidak stabil dan belum mampu keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi penghambat signifikan. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih terbatas menyebabkan masyarakat sulit bersaing di pasar kerja formal maupun mengembangkan usaha yang bernilai tambah tinggi. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat pendapatan. Faktor berikutnya adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah. Kondisi geografis yang relatif terpencil serta infrastruktur transportasi dan ekonomi yang belum merata menyebabkan biaya distribusi tinggi, akses pasar terbatas, dan keterisolasian ekonomi di beberapa wilayah.

Di sisi lain, ketergantungan pada sektor ekonomi primer juga menjadi faktor penghambat. Dominasi sektor pertanian dengan produktivitas rendah dan sangat bergantung pada kondisi alam membuat pendapatan masyarakat rentan terhadap perubahan cuaca dan fluktuasi produksi. Selanjutnya, efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang belum optimal juga dapat memengaruhi capaian. Beberapa program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya tepat sasaran atau belum cukup kuat untuk mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara permanen.

Faktor lain yang turut berpengaruh adalah keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha. Akses yang belum merata ini menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dalam jangka panjang. Selain itu, tekanan ekonomi eksternal, seperti inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan ketidakstabilan ekonomi

regional maupun nasional, juga dapat memperlambat penurunan tingkat kemiskinan karena menurunkan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, belum tercapainya target penurunan kemiskinan menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan masih bersifat multidimensi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, tidak hanya berbasis bantuan sosial, tetapi juga penguatan ekonomi produktif, peningkatan kualitas SDM, serta pemerataan pembangunan wilayah.

➤ **Upaya/Strategi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk menurunkan angka persentase kemiskinan**

Kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensional, karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta peluang ekonomi. Kondisi geografis yang relatif terpencil dan tersebar menyebabkan sebagian wilayah sulit dijangkau, sehingga memperlambat distribusi pembangunan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah daerah mendorong pemanfaatan potensi sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil sebagai sumber utama penghidupan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, strategi ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya produktivitas, keterbatasan teknologi, serta akses pasar yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi saja tidak cukup, melainkan harus diiringi dengan penguatan sistem distribusi dan pemasaran agar nilai ekonomi yang diperoleh masyarakat dapat meningkat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam mendukung penurunan kemiskinan. Ketersediaan jalan yang memadai, akses listrik, air bersih, serta sarana transportasi sangat berpengaruh terhadap aktivitas

ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan menurunkan biaya distribusi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan membuka peluang investasi. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur menyebabkan isolasi wilayah yang berdampak pada tingginya biaya hidup dan rendahnya daya saing ekonomi masyarakat setempat.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga merupakan strategi penting dalam mengatasi kemiskinan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, seperti angka putus sekolah, keterbatasan tenaga pendidik, serta akses pendidikan yang belum merata. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki kapasitas untuk keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri.

Di sisi lain, program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai dan bantuan pangan juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat miskin. Program ini efektif dalam jangka pendek untuk mengurangi beban ekonomi, terutama dalam kondisi krisis. Akan tetapi, jika tidak diimbangi dengan program pemberdayaan, bantuan sosial berpotensi menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu, bantuan sosial seharusnya menjadi pelengkap dari strategi yang lebih luas dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok usaha, koperasi, dan program berbasis partisipasi juga menjadi pendekatan yang penting. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Namun, pelaksanaannya seringkali terkendala oleh rendahnya kapasitas manajerial dan kurangnya pendampingan dari pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya membutuhkan program, tetapi juga proses pembinaan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, berbagai strategi yang telah dilakukan menunjukkan adanya upaya serius dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam hal koordinasi antar program, efektivitas pelaksanaan, serta ketepatan sasaran kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan yang lebih baik, penggunaan data yang akurat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian kinerja penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Dengan target sebesar 3,00 persen dan realisasi sebesar 2,98 persen, hal ini berarti tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga berada di bawah target yang telah ditetapkan. Secara kuantitatif, capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan angka pengangguran serta menunjukkan bahwa program-program ketenagakerjaan yang dijalankan telah memberikan dampak yang nyata.

Keberhasilan ini dapat dianalisis sebagai hasil dari berbagai upaya strategis, seperti peningkatan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor ekonomi lokal, termasuk pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil. Selain itu, adanya pelatihan keterampilan kerja dan program pemberdayaan masyarakat turut berkontribusi dalam meningkatkan kesiapan tenaga kerja untuk masuk ke pasar kerja. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada lapangan kerja formal, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri.

Di sisi lain, capaian ini juga mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia, meskipun masih perlu ditingkatkan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja mulai menunjukkan hasil yang efektif.

Meskipun demikian, selisih capaian yang relatif kecil (0,02 persen di bawah target) menunjukkan bahwa keberhasilan ini masih berada pada batas yang tipis. Artinya, diperlukan upaya yang lebih konsisten dan berkelanjutan untuk menjaga bahkan meningkatkan capaian tersebut di masa mendatang. Tantangan seperti keterbatasan lapangan kerja berkualitas, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta ketimpangan wilayah masih perlu menjadi perhatian utama.

Secara keseluruhan, capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,98 persen pada tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai kinerja yang baik karena telah melampaui target. Namun, keberhasilan ini harus terus dipertahankan melalui penguatan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah agar penyerapan tenaga kerja dapat berlangsung secara berkelanjutan dan lebih merata.

➤ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 (target 3,00% dan tercapai 2,98%) dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama yang saling berkaitan.

Pertama, meningkatnya aktivitas ekonomi lokal menjadi faktor penting dalam menyerap tenaga kerja. Pengembangan sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil telah membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Ketika sektor-sektor ini tumbuh, kebutuhan tenaga kerja ikut meningkat sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran secara langsung.

Kedua, program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja turut berkontribusi terhadap keberhasilan ini. Dengan adanya pelatihan vokasi dan pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja menjadi lebih siap dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini mempermudah mereka untuk memperoleh pekerjaan atau bahkan menciptakan usaha sendiri.

Ketiga, dukungan program pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi juga menjadi faktor penentu. Program seperti

bantuan usaha, pendampingan UMKM, serta kegiatan padat karya mampu memberikan lapangan kerja sementara maupun berkelanjutan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Keempat, perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Infrastruktur yang lebih baik mempermudah distribusi barang dan jasa, memperlancar mobilitas tenaga kerja, serta menarik minat investasi yang pada akhirnya membuka peluang kerja baru.

Kelima, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi menjadi faktor pendukung lainnya. Masyarakat mulai lebih aktif dalam memanfaatkan peluang usaha dan tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal. Hal ini memperluas basis ekonomi dan mengurangi tekanan terhadap pasar kerja formal.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi antara kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta partisipasi masyarakat. Sinergi dari berbagai faktor tersebut memungkinkan target penurunan pengangguran tidak hanya tercapai, tetapi juga sedikit melampaui yang telah ditetapkan.

➤ **Faktor Penghambat/Resiko Kegagalan Penuruna Tingkat Pengangguran Terbuka**

Faktor risiko kegagalan pencapaian penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nias Selatan dapat dianalisis dari berbagai aspek yang berpotensi menghambat keberlanjutan kinerja yang telah dicapai.

Pertama, terbatasnya lapangan kerja formal menjadi risiko utama. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor informal dan tradisional menyebabkan daya serap tenaga kerja terbatas, terutama bagi angkatan kerja baru. Jika pertumbuhan sektor ekonomi tidak mampu menciptakan pekerjaan yang cukup, maka angka pengangguran berpotensi meningkat kembali.

Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah membuat tenaga kerja sulit bersaing, baik di tingkat lokal maupun luar daerah. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja (mismatch) dapat menyebabkan pengangguran tetap tinggi meskipun ada peluang kerja.

Ketiga, ketergantungan pada sektor ekonomi primer seperti pertanian tradisional menimbulkan risiko yang cukup besar. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, harga komoditas, dan kondisi alam. Jika terjadi gagal panen atau penurunan harga hasil pertanian, maka pendapatan masyarakat menurun dan dapat memicu peningkatan pengangguran terselubung.

Keempat, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah masih menjadi kendala serius. Wilayah yang sulit dijangkau akan menghambat masuknya investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, peluang penciptaan lapangan kerja menjadi terbatas.

Kelima, kurangnya investasi dan dunia usaha juga menjadi risiko penting. Minimnya investor yang masuk ke daerah menyebabkan terbatasnya industri dan sektor jasa yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan lapangan kerja baru.

Keenam, ketergantungan pada program pemerintah dapat menjadi faktor risiko apabila tidak diimbangi dengan kemandirian masyarakat. Jika program bantuan atau padat karya berkurang, sementara masyarakat belum memiliki usaha yang mandiri, maka tingkat pengangguran bisa kembali meningkat.

Ketujuh, lemahnya koordinasi dan implementasi kebijakan juga berpotensi menghambat pencapaian target. Program yang tidak terintegrasi, data yang kurang akurat, serta pengawasan yang lemah dapat menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran dan kurang efektif.

Secara keseluruhan, risiko kegagalan penurunan pengangguran di Kabupaten Nias Selatan dipengaruhi oleh faktor struktural, kualitas SDM, serta keterbatasan ekonomi dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

➤ **Upaya-upaya Strategi Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nias Selatan**

Upaya strategis untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nias Selatan perlu dilakukan secara terarah dan menyentuh akar permasalahan ketenagakerjaan. Strategi ini harus menggabungkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan ekonomi lokal.

Pertama, pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah menjadi langkah utama. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan usaha mikro kecil (UMKM) sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Pengolahan hasil pertanian dan perikanan juga harus ditingkatkan agar memiliki nilai tambah, sehingga mampu membuka peluang kerja baru di sektor industri kecil dan menengah.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Program pelatihan vokasi, kursus keterampilan, dan sertifikasi tenaga kerja harus diperluas, terutama bagi lulusan sekolah menengah dan pencari kerja. Dengan keterampilan yang memadai, tenaga kerja akan lebih mudah terserap di dunia kerja atau menciptakan usaha sendiri.

Ketiga, mendorong kewirausahaan dan ekonomi kreatif sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha, pelatihan manajemen bisnis, serta pendampingan bagi pelaku usaha baru. Pengembangan kewirausahaan ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal yang jumlahnya terbatas.

Keempat, peningkatan investasi dan kemudahan berusaha perlu dilakukan untuk menarik investor masuk ke daerah. Penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta promosi potensi daerah dapat mendorong tumbuhnya sektor industri dan jasa. Dengan masuknya investasi, peluang kerja akan semakin terbuka luas.

Kelima, pembangunan dan pemerataan infrastruktur menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Akses jalan, listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi yang memadai akan memperlancar aktivitas ekonomi serta membuka keterisolasian wilayah. Hal ini akan mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

Keenam, pelaksanaan program padat karya dan perlindungan tenaga kerja dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi pengangguran. Program ini tidak hanya memberikan penghasilan sementara, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh pengalaman kerja. Namun, program ini harus diiringi dengan upaya jangka panjang agar tidak menimbulkan ketergantungan.

Ketujuh, penguatan sistem informasi pasar kerja juga perlu dikembangkan. Penyediaan informasi lowongan kerja, bursa kerja, serta layanan penempatan tenaga kerja akan membantu mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja secara lebih efektif. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan informasi yang sering menjadi penyebab pengangguran.

Secara keseluruhan, upaya strategis penurunan pengangguran di Kabupaten Nias Selatan harus dilakukan melalui pendekatan yang terpadu antara peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan kebijakan yang kondusif. Dengan strategi yang konsisten dan berkelanjutan, tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan secara signifikan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Tujuan/Sasaran Strategis

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	62	66,63	93%

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias Selatan pada tahun berjalan menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana realisasi sebesar 66,63 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 62. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Selisih capaian yang cukup tinggi menunjukkan bahwa program reformasi birokrasi tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan hasil yang lebih optimal dari yang diharapkan.

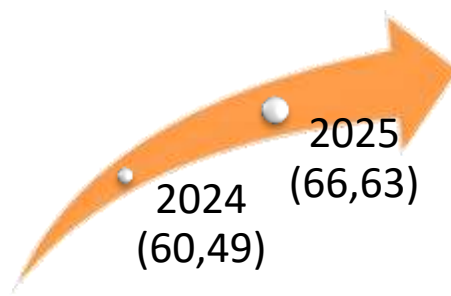
Keberhasilan ini dapat dianalisis sebagai hasil dari peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang meliputi penataan organisasi, penyederhanaan prosedur kerja, serta penguatan sistem pengawasan internal. Implementasi kebijakan reformasi birokrasi seperti digitalisasi layanan, peningkatan disiplin aparatur, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) turut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai indeks. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi di daerah tersebut mulai bergerak ke arah yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi faktor penting dalam pencapaian ini. Upaya perbaikan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penerapan prinsip pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Namun demikian, meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Beberapa aspek seperti konsistensi implementasi kebijakan, pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah, serta penguatan budaya kerja aparatur masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar capaian reformasi birokrasi tidak bersifat sementara, melainkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 66,63 menunjukkan bahwa Kabupaten Nias Selatan telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa berbagai upaya perbaikan birokrasi telah berjalan efektif, namun tetap memerlukan komitmen dan inovasi berkelanjutan agar kualitas birokrasi semakin meningkat di masa yang akan datang.

Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias Selatan



➤ Faktor pendukung keberhasilan

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias Selatan yang melampaui target (62 menjadi 66,63) dapat dianalisis dari beberapa aspek penting berikut:

1. komitmen pimpinan daerah dan jajaran birokrasi menjadi faktor utama. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh adanya keseriusan dan konsistensi dari pimpinan dalam mendorong perubahan tata kelola pemerintahan. Komitmen ini tercermin dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, serta dorongan terhadap peningkatan kinerja aparatur.
2. peningkatan sistem akuntabilitas kinerja seperti penerapan SAKIP yang lebih baik turut berkontribusi signifikan. Dengan sistem ini, setiap instansi pemerintah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kinerja secara terukur. Hal ini mendorong birokrasi menjadi lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.
3. digitalisasi layanan dan administrasi pemerintahan menjadi faktor pendukung yang penting. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan

manajemen internal membantu mempercepat proses kerja, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat.

4. peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan disiplin kerja. Aparatur yang kompeten dan profesional akan lebih mampu menjalankan tugas secara efektif, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan dan kinerja organisasi.
5. perbaikan kualitas pelayanan publik juga menjadi faktor keberhasilan. Adanya standar pelayanan yang lebih jelas, prosedur yang sederhana, serta orientasi pada kepuasan masyarakat mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini menjadi indikator penting dalam penilaian reformasi birokrasi.
6. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal membantu memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai aturan dan tujuan. Dengan pengawasan yang baik, potensi penyimpangan dapat diminimalkan, sehingga kinerja organisasi menjadi lebih akuntabel.
7. koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah juga berperan besar. Reformasi birokrasi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor agar program dapat terintegrasi dan saling mendukung.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi antara kepemimpinan yang kuat, sistem yang baik, aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi dan koordinasi yang efektif. Sinergi dari berbagai faktor tersebut memungkinkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan.

➤ **Upaya Strategi Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi**

Untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias Selatan agar lebih baik dari capaian saat ini (66,63), diperlukan strategi yang tidak hanya melanjutkan program yang sudah ada, tetapi juga memperdalam kualitas implementasi dan inovasi birokrasi. Upaya ini harus berfokus pada perubahan sistem, budaya kerja, dan kualitas layanan publik antara lain :

1. memperkuat komitmen dan kepemimpinan reformasi birokrasi. Pimpinan daerah dan seluruh kepala perangkat daerah harus menjadi role model dalam penerapan prinsip good governance. Komitmen ini perlu diwujudkan dalam

- pengawasan yang konsisten, penegakan disiplin, serta dorongan terhadap inovasi di setiap unit kerja.
2. meningkatkan kualitas implementasi SAKIP secara lebih substantif. Tidak hanya sekadar memenuhi administrasi, tetapi memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaporan benar-benar berbasis kinerja dan hasil (outcome). Indikator kinerja harus lebih tajam, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat.
 3. memperluas dan memperdalam digitalisasi birokrasi (e-government). Pengembangan layanan berbasis digital perlu ditingkatkan agar lebih terintegrasi antar instansi. Sistem pelayanan online, pengelolaan data terpadu, serta penggunaan aplikasi pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan.
 4. meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Standar pelayanan perlu terus diperbaiki dengan prinsip cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Selain itu, perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin untuk mengetahui kekurangan layanan dan melakukan perbaikan berbasis umpan balik.
 5. penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur. Pelatihan, pengembangan kompetensi, serta sistem merit dalam manajemen ASN harus diterapkan secara konsisten. Penempatan pegawai harus berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan faktor non-teknis.
 6. penguatan pengawasan internal dan pencegahan korupsi. Peran inspektorat daerah perlu ditingkatkan dalam melakukan audit, monitoring, dan evaluasi. Selain itu, penerapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) perlu diperluas.
 7. mendorong inovasi daerah dalam pelayanan dan tata kelola. Setiap perangkat daerah perlu didorong untuk menciptakan inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Inovasi ini dapat berupa penyederhanaan layanan, pemanfaatan teknologi, atau program-program baru yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
 8. memperkuat koordinasi dan integrasi kebijakan lintas sektor. Reformasi birokrasi harus dilakukan secara terpadu, tidak parsial. Sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlu diperkuat agar seluruh kebijakan saling mendukung.

Secara keseluruhan, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi ke tingkat yang lebih tinggi membutuhkan perubahan yang lebih mendalam, tidak hanya pada sistem, tetapi juga pada budaya kerja aparatur dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Dengan strategi yang konsisten, inovatif, dan berkelanjutan, capaian reformasi birokrasi dapat terus ditingkatkan menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Tujuan/Sasaran Strategis

Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,95	2,9	98%
Indeks Pelayanan Publik	2,5	2,57	102,8%

Berdasarkan tabel diatas, Tujuan/sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat” terdiri dari 2 indikator sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 2,95, realisasi yang dicapai adalah 2,90, atau sekitar 98,3 persen dari target. Selisih sebesar 0,05 poin ini mengindikasikan adanya kesenjangan kinerja yang relatif kecil, namun tetap menunjukkan bahwa pelaksanaan SPBE masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek.

Secara umum, nilai capaian 2,90 menempatkan pelaksanaan SPBE Kabupaten Nias Selatan dalam kategori baik, yang mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik telah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini terlihat dari mulai terbangunnya tata kelola digital, tersedianya berbagai layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta adanya

upaya penerapan kebijakan internal yang mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Implementasi SPBE juga telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

Namun demikian, belum tercapainya target yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi SPBE. Kesenjangan ini kemungkinan disebabkan oleh belum optimalnya integrasi sistem antar perangkat daerah, sehingga masih terdapat aplikasi atau layanan yang berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terhubung. Selain itu, penerapan arsitektur SPBE sebagai acuan dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya konsisten, sehingga berdampak pada belum optimalnya interoperabilitas data dan layanan.

Dari sisi tata kelola, meskipun struktur dan kebijakan SPBE telah tersedia, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal koordinasi lintas perangkat daerah. Hal ini penting untuk mengurangi ego sektoral dan mendorong kolaborasi dalam pengembangan serta pemanfaatan sistem elektronik secara terpadu. Di sisi lain, aspek manajemen SPBE, seperti pengelolaan risiko, keamanan informasi, serta monitoring dan evaluasi, juga masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi capaian ini. Selain itu, dukungan infrastruktur, terutama jaringan internet di wilayah tertentu, serta alokasi anggaran yang belum sepenuhnya difokuskan pada pengembangan SPBE, turut menjadi tantangan dalam mencapai target yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, capaian yang diperoleh tetap menunjukkan arah yang positif dalam transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan. Dengan selisih yang relatif kecil dari target, terdapat peluang besar untuk meningkatkan nilai SPBE pada periode berikutnya melalui penguatan tata

kelola, peningkatan integrasi sistem, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi infrastruktur dan keamanan informasi.

Dengan upaya perbaikan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan implementasi SPBE di Kabupaten Nias Selatan ke depan dapat mencapai tingkat yang lebih optimal, sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berbasis pelayanan publik yang berkualitas.

➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Indeks SPBE**

Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks SPBE tidak terlepas dari adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital pemerintahan. Komitmen ini tercermin dari dukungan pimpinan daerah yang secara konsisten mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dukungan tersebut menjadi landasan utama dalam menggerakkan seluruh perangkat daerah untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi SPBE. Selain itu, tersedianya regulasi dan kebijakan internal yang mengatur penyelenggaraan SPBE juga menjadi faktor penting. Adanya peraturan, pedoman, serta standar operasional prosedur memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan SPBE, sehingga setiap perangkat daerah memiliki acuan yang sama dalam mengembangkan dan mengelola layanan berbasis elektronik.

Faktor keberhasilan lainnya adalah mulai terbentuknya tata kelola SPBE yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya pembagian peran dan tanggung jawab antar perangkat daerah, khususnya perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika sebagai koordinator. Meskipun masih perlu penguatan, tata kelola yang sudah berjalan ini mampu mendukung koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SPBE secara bertahap. Dari sisi implementasi, keberhasilan juga didukung oleh ketersediaan berbagai aplikasi layanan pemerintahan, baik untuk layanan internal administrasi maupun layanan publik. Pemanfaatan aplikasi-aplikasi tersebut telah membantu meningkatkan efisiensi proses kerja serta mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan sudah mulai diadopsi secara luas di lingkungan pemerintah daerah.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meskipun belum sepenuhnya optimal, juga turut memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja. Adanya pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan dalam pengelolaan sistem elektronik membantu aparatur dalam memahami dan mengoperasikan teknologi yang digunakan dalam SPBE. Di samping itu, dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti jaringan internet dan perangkat keras, menjadi faktor pendukung penting. Ketersediaan infrastruktur ini memungkinkan sistem elektronik dapat berjalan dan dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pemerintahan sehari-hari.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya proses evaluasi dan penilaian SPBE yang dilakukan secara berkala. Evaluasi ini mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap kekurangan yang ada, sehingga capaian kinerja dapat meningkat dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian target kinerja Indeks SPBE Kabupaten Nias Selatan merupakan hasil dari sinergi berbagai faktor, mulai dari komitmen pimpinan, dukungan kebijakan, tata kelola yang mulai terbangun, pemanfaatan teknologi, hingga dukungan sumber daya dan infrastruktur. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, faktor-faktor tersebut telah menjadi fondasi penting dalam mendorong keberhasilan implementasi SPBE di daerah.

➤ **Faktor Yang Berpotensi Menghambat Pencapaian Kinerja Indeks SPBE**

Pencapaian kinerja Indeks SPBE tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendukung, tetapi juga menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat optimalisasi implementasinya. Salah satu faktor utama yang sering menjadi hambatan adalah belum optimalnya integrasi sistem antar perangkat daerah. Dalam banyak kasus, aplikasi yang dikembangkan masih berjalan secara parsial (silo), sehingga pertukaran data dan interoperabilitas antar sistem belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efisiensi yang diharapkan dari SPBE belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi juga menjadi kendala signifikan. Tidak semua perangkat daerah memiliki tenaga yang kompeten dalam pengelolaan sistem elektronik, baik dari sisi teknis maupun manajerial. Kurangnya pemahaman terhadap konsep SPBE dan minimnya pelatihan berkelanjutan berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan aplikasi yang telah tersedia. Faktor lain yang menghambat adalah belum kuatnya tata kelola SPBE secara menyeluruh. Meskipun kebijakan dan struktur organisasi sudah ada, implementasinya seringkali belum berjalan efektif. Koordinasi lintas perangkat daerah masih menghadapi tantangan, termasuk adanya ego sektoral yang menyebabkan kurangnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem secara terintegrasi.

Dari sisi infrastruktur, keterbatasan jaringan internet dan sarana prasarana teknologi informasi di beberapa wilayah juga menjadi penghambat. Kualitas jaringan yang tidak stabil atau belum merata dapat mengganggu akses dan penggunaan layanan berbasis elektronik, baik oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh. Pengembangan dan pemeliharaan sistem SPBE memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pengadaan perangkat, pengembangan aplikasi, hingga peningkatan kapasitas SDM. Jika alokasi anggaran belum menjadi prioritas, maka pengembangan SPBE akan berjalan lambat.

Selain itu, aspek keamanan informasi dan manajemen risiko yang belum matang juga dapat menjadi hambatan. Tanpa sistem keamanan yang memadai, terdapat potensi risiko gangguan, kebocoran data, atau serangan siber yang dapat mengganggu keberlangsungan layanan SPBE. Faktor lainnya adalah belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE. Tanpa evaluasi yang terstruktur dan berbasis data, sulit untuk mengidentifikasi kelemahan secara tepat dan melakukan perbaikan yang efektif. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi dalam peningkatan nilai indeks SPBE.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga memerlukan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola yang

kuat, serta dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai. Apabila hambatan-hambatan ini tidak segera diatasi, maka akan berpotensi memperlambat peningkatan kinerja SPBE di Kabupaten Nias Selatan pada masa mendatang.

➤ **Upaya Strategis Untuk Meningkatkan Kinerja Indeks SPBE kabupaten Nias Selatan**

Peningkatan capaian Indeks SPBE Kabupaten Nias Selatan memerlukan langkah strategis yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator penilaian, tetapi juga pada transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu strategi utama adalah penguatan tata kelola SPBE. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya regulasi yang kuat dan konsisten, seperti penyusunan dan penyempurnaan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE (roadmap), serta kebijakan internal yang mengatur integrasi sistem antar perangkat daerah. Selain itu, komitmen pimpinan daerah menjadi faktor kunci dalam mendorong implementasi SPBE secara menyeluruh.

Selanjutnya, diperlukan pengembangan layanan digital yang terintegrasi. Aplikasi-aplikasi yang selama ini berjalan secara sektoral perlu diintegrasikan dalam satu platform terpadu agar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Interoperabilitas data antar OPD juga harus diperkuat melalui pembangunan pusat data daerah dan penerapan standar data yang baku. Strategi berikutnya adalah peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil dan merata, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, penguatan keamanan informasi melalui penerapan sistem keamanan siber dan perlindungan data pribadi juga menjadi prioritas penting.

Di sisi sumber daya manusia, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dalam bidang digital. Pelatihan, bimbingan teknis, serta sertifikasi di bidang TIK harus diperluas agar aparatur mampu mengelola dan mengembangkan sistem berbasis elektronik secara mandiri dan profesional.

Selain itu, penting untuk mendorong evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap implementasi SPBE. Pemerintah daerah perlu melakukan penilaian internal secara rutin terhadap indikator SPBE, mengidentifikasi kelemahan, serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dengan cepat dan tepat.

Terakhir, upaya strategis juga mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Kerja sama ini dapat mempercepat adopsi inovasi teknologi serta meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital. Dengan implementasi strategi-strategi tersebut secara konsisten dan terarah, diharapkan capaian Indeks SPBE Kabupaten Nias Selatan dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. Indeks Pelayanan Publik

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 2,5, realisasi yang dicapai adalah 2,57. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik, baik dari sisi pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara, maupun pengelolaan pengaduan masyarakat.

Keberhasilan melampaui target ini tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari aspek kebijakan pelayanan publik, perangkat daerah telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi komponen standar pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penyusunan dan publikasi standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta penerapan sistem informasi pelayanan. Pada aspek kelembagaan dan tata laksana pelayanan, terlihat adanya peningkatan koordinasi antar unit pelayanan, termasuk penguatan fungsi unit pelayanan terpadu. Hal ini berdampak pada meningkatnya konsistensi dalam proses pelayanan serta kejelasan alur layanan yang diterima masyarakat.

Selanjutnya, dari sisi sumber daya manusia, aparatur penyelenggara pelayanan publik telah menunjukkan peningkatan kapasitas dan profesionalisme. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam pelatihan pelayanan prima, peningkatan disiplin kerja, serta kemampuan dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat. Pada aspek sarana dan prasarana pelayanan, pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai perbaikan, seperti penyediaan fasilitas pendukung di unit pelayanan (ruang tunggu, loket layanan, akses bagi disabilitas, dan media informasi). Perbaikan ini memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat dalam mengakses layanan.

Selain itu, penguatan pada pengelolaan pengaduan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan indeks. Mekanisme pengaduan yang lebih terbuka dan responsif, baik melalui kanal langsung maupun berbasis digital, telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan, seperti konsistensi penerapan standar pelayanan di seluruh OPD, optimalisasi digitalisasi layanan, serta peningkatan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, capaian nilai 2,57 ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nias Selatan berada pada kategori yang semakin baik, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya secara lebih optimal, inovatif, dan berkelanjutan.

➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa aspek utama, yaitu:

- Pemenuhan standar pelayanan publik, yang meliputi ketersediaan dan publikasi standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta prosedur operasional yang jelas pada unit layanan.
- Peningkatan kualitas kelembagaan pelayanan, melalui penguatan koordinasi dan konsistensi pelaksanaan pelayanan pada perangkat daerah.

- Peningkatan kompetensi aparatur, yang ditunjukkan melalui sikap profesional, responsivitas, serta pemahaman terhadap prinsip pelayanan prima.
- Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan, seperti penyediaan ruang layanan yang representatif, media informasi, serta fasilitas pendukung lainnya.
- Pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih responsif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
- Digitalisasi layanan pada beberapa sektor turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.

➤ **Faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja IPP**

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Belum meratanya kualitas pelayanan antar perangkat daerah
- Keterbatasan infrastruktur pendukung, terutama jaringan dan perangkat TIK
- Kompetensi SDM pelayanan yang belum merata
- Digitalisasi layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi
- Pengelolaan pengaduan yang belum optimal di seluruh unit layanan

Kendala tersebut menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

➤ **Upaya Perbaikan dan Tindakan lanjut**

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Pelayanan Publik ke depan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan standarisasi pelayanan publik di seluruh perangkat daerah
- Mendorong integrasi dan digitalisasi layanan publik secara bertahap
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pelayanan melalui pelatihan dan bimbingan teknis
- Memperkuat sarana dan prasarana layanan, termasuk fasilitas ramah disabilitas

- Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala
- Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat

Tujuan/Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,56	76,37*	142,58%

Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 53,56, dengan realisasi mencapai 76,37, sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 142,58%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melampaui target secara signifikan. Nilai realisasi yang jauh di atas target mengindikasikan adanya peningkatan kualitas lingkungan yang cukup tinggi, baik dari aspek kualitas air, udara, maupun tutupan lahan.

Keberhasilan ini mencerminkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif. Peningkatan nilai IKLH menunjukkan kondisi lingkungan yang semakin baik, yang didukung oleh pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan. Selain itu, capaian yang melampaui target juga dapat mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan relatif konservatif dibandingkan dengan potensi dan kondisi riil di lapangan.

Kabupaten Nias Selatan memiliki karakteristik wilayah yang masih didominasi oleh kawasan hutan lindung dan hutan alam, sehingga kondisi tutupan lahannya relatif terjaga dengan baik. Keberadaan kawasan hutan tersebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk dalam mempertahankan kualitas

udara, menjaga ketersediaan sumber air, serta mengurangi risiko bencana lingkungan seperti erosi dan banjir.

Dominasi tutupan hutan ini menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan bahwa tekanan terhadap alih fungsi lahan masih relatif terkendali dibandingkan dengan daerah lain yang lebih berkembang secara industri maupun perkotaan.

Namun demikian, keberadaan hutan lindung tersebut tetap memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang berkelanjutan agar tidak mengalami degradasi di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong upaya perlindungan kawasan hutan melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.



➤ Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

- Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan
- Pengendalian pencemaran lingkungan yang semakin efektif, khususnya pada sektor air dan limbah
- Terjaganya tutupan lahan/hutan, yang berkontribusi besar terhadap peningkatan indeks

- Partisipasi masyarakat, dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan
- Sinergi lintas sektor, antara perangkat daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Program rehabilitasi dan konservasi lingkungan yang berjalan dengan baik

Meskipun capaian sangat tinggi, masih terdapat beberapa potensi kendala, antara lain:

- Keterbatasan pengawasan lingkungan di wilayah terpencil
- Ancaman alih fungsi lahan yang tidak terkendali
- Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan
- Kesadaran masyarakat yang belum merata
- Keterbatasan data lingkungan yang akurat dan terintegrasi

➤ **Upaya Strategis dan Tindaklanjut Peningkatan IKLH Kabupaten Nias Selatan**

Upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nias Selatan ke depan diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis pada karakteristik wilayah yang masih didominasi oleh kawasan hutan lindung. Kondisi ini merupakan modal utama yang harus dijaga melalui kebijakan yang konsisten dalam perlindungan tutupan lahan serta pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Pemerintah daerah terus mendorong penerapan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, disertai dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan dan ekosistem alami.

Di sisi lain, peningkatan kualitas lingkungan juga difokuskan pada pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah melalui penguatan sistem pemantauan lingkungan yang lebih akurat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk penyediaan sarana prasarana pendukung seperti laboratorium lingkungan serta sistem informasi berbasis digital yang mampu menyediakan data kualitas lingkungan secara real time. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap potensi pencemaran.

Pengelolaan sampah dan limbah juga menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan IKLH. Pemerintah daerah terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berorientasi pada pengurangan dari sumbernya, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui penguatan budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Upaya ini diiringi dengan peningkatan layanan pengelolaan sampah serta pengembangan inovasi berbasis masyarakat yang mampu memberikan dampak langsung terhadap kualitas lingkungan di tingkat lokal.

Selain itu, peningkatan IKLH juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah secara berkelanjutan melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pelestarian lingkungan hidup, baik melalui kegiatan formal maupun nonformal. Pelibatan masyarakat dalam berbagai program konservasi dan pengelolaan lingkungan diharapkan mampu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan upaya tersebut, penguatan tata kelola lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat regulasi, serta mendorong penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan lingkungan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan sektor swasta, guna menghadirkan solusi yang lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, strategi dan tindak lanjut yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai IKLH semata, tetapi juga pada upaya menjaga keberlanjutan kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang. Dengan pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis data, diharapkan Kabupaten Nias Selatan dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas lingkungannya sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

C. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025 disajikan pada table di bawah ini :

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	PERUBAHAN (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	64.98	65.87	1.37
2	Angka Kemiskinan	16.39	16.32	-0.43
3	Angka Pengangguran	3.48	3.03	-12.93
4	Pertumbuhan Ekonomi	3.65	3.82	4.66
5	Pendapatan Per-Kapita	8574.98	9128.45	6.45
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.247	0.258	4.45

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

a. Urusan Pemerintahan wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian
Dinas Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	82,4611162
	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	82,6598526
	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	56,0377358
	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	46,4969896

Dinas Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,3264418
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	82,830385
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	71,8542141
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	71,8542141
	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	70,9864423
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-
	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100
	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	-
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,4411635
	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	2,9538944
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	3,1502233
	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100
	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	80,2960494
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	49,9950995
Dinas Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	40
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-

	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100
	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100
BPBD	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	-
SATPOL	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100
	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	31,25
BPBD	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
SATPOL	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	72,2222222
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	-
	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	-
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	-
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100
Dinas PUTR	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	28,46
	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	32,48
	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	-

	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	12,45
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	-
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100
	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100
	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100
	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-
	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100

b. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian
Dinas Pariwisata	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	9,4117647
	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	-3,8720698
	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,6702094
	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	-
	Persentase jumlah atlet berprestasi	24
Dinas KB	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100

	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100
Dinas Dukcapil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	86,9542964
	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	38,6937958
	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100
	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	63,8767206
	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100
	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100
	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100
Dinas Pemerintahan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	9,8901099
	Persentase peningkatan status desa mandiri	100
	Persentase fasilitasi kerja sama desa	100
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	74,820971
	Realisasi total terhadap target investasi	76,4635533
Dinas Koperasi dan UMKM	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	12,3895581
	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	100
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	25
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	-
	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	-

Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	92,3076923
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	65,9997348
	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	99,9102334
	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	86,0566449
BPKPD	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	32,3311357
Dinas PUTR	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	-
	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	-
Dinas Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,54
	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,6
	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	-
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	100
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	5,8426643
Dinas Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	85
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	-

	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	-
Dinas KB	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	-
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	-
	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	-

c. Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian
Dinas Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	19,9411756
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	10,0711744
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	12,7647715
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	-
	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	-
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	12,8113879
	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	-
	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-

Dinas Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	-22,9296034
	Peningkatan produksi hortikultura	24,3055556
	Peningkatan produksi komoditas peternakan	-48,3817035
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	18,399264
Dinas Perikanan	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	-
	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	-

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian
BAPPERIDA	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	88,2352941
BPKPD	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	26,8396123
	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	3,2659616
	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	74,1026904
	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	16,9460401
BKPSDM	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	77,5036284
Inspektorat	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2
	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3
	Manajemen risiko Indeks	-

	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	78,2013685
PBJ	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	31,11
	Pemanfaatan sistem pengadaan	21,25
	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	2,5
Sekwan	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1
	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	58,33333333
Bagian Organisasi	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-
BAPERIDA	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	60

D. PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

Penghargaan Yang diterima Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025, Kabupaten Nias Selatan mendapat beberapa penghargaan sebagai berikut :

- a. Bunda PAUD Kabupaten Nias Selatan, Ny. Militina Sokhiatulo Laia, sebagai Penerima Penghargaan Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Kategori Wiyata Darma Muda Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi membanggakan dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nias Selatan. Pengakuan ini merupakan bukti atas dedikasi, komitmen, dan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD serta penguatan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh satuan PAUD dan pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Nias Selatan untuk terus meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.
- b. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menerima SAKIP Award 2025 dengan predikat B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, serta pelaporan yang berorientasi pada hasil. Penerimaan penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

- c. Kabupaten Nias Selatan berhasil meraih penghargaan Kategori Pratama dalam ajang UHC Awards Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia bersama pemangku kepentingan nasional di bidang jaminan kesehatan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kesungguhan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Secara nasional, penghargaan UHC diberikan kepada ratusan pemerintah daerah yang dinilai berhasil memperluas cakupan kepesertaan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dengan klasifikasi kategori Utama, Madya, dan Pratama. Capaian kategori Pratama yang diraih Kabupaten Nias Selatan mencerminkan keberhasilan dalam memperluas kepesertaan JKN hingga mendekati atau mencapai cakupan menyeluruh, serta memastikan masyarakat memiliki perlindungan finansial terhadap risiko biaya kesehatan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program jaminan kesehatan. Lebih lanjut, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Nias Selatan telah berjalan pada jalur yang tepat, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat akses hingga ke wilayah terpencil, serta menjaga keberlanjutan program UHC sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Nias Selatan diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian UHC ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara berkesinambungan.

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 pada komponen belanja menunjukkan bahwa dari target yang ditetapkan sebesar **Rp1.541.253.528.663**, terealisasi sebesar **Rp1.257.849.522.134**. Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran belanja daerah mencapai sekitar 81,61%. Berikut adalah tabel realisasi belanja daerah tahun 2025:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BELANJA	1.541.253.528.663,01	1.257.849.522.134,61	81,61
BELANJA OPERASI	881.717.794.492,61	761.126.157.923,81	86,32
Belanja Pegawai	522.842.825.767,85	479.523.086.830,00	91,71
Belanja Barang dan Jasa	267.292.700.274,76	207.493.183.278,81	77,63
Belanja Subsidi	2.706.470.450,00	2.949.400.000,00	108,98
Belanja Hibah	87.068.848.000,00	69.485.512.815,00	80,34
Belanja Bantuan Sosial	1.806.950.000,00	1.211.975.000,00	67,07
BELANJA MODAL	195.877.091.081,80	175.303.941.902,80	89,50
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.405.404.432,90	30.052.610.455,00	84,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.586.525.170,00	72.664.327.407,00	98,75
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	85.608.121.478,90	71.636.843.940,80	83,68
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	224.290.000,00	223.510.000,00	99,65
Belanja Modal Aset Lainnya	1.052.750.000,00	726.650.100,00	69,02
BELANJA TAK TERDUGA	2.500.000.000,00	828.284.936,00	33,13
Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	828.284.936,00	33,13
TRANSFER	461.158.643.088,60	320.591.137.372,00	69,52
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota dan Desa	1.546.331.488,60	0,00	0,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	459.612.311.600,00	320.591.137.372,00	69,75
--	--------------------	--------------------	-------

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran secara umum telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam mencapai target yang telah direncanakan. Tingkat realisasi ini mengindikasikan bahwa sebagian program dan kegiatan telah terlaksana sesuai rencana, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi secara maksimal hingga akhir tahun anggaran. Belum optimalnya penyerapan anggaran tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya penyesuaian kebijakan selama tahun berjalan. Selain itu, kapasitas perencanaan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan di beberapa perangkat daerah juga turut mempengaruhi tingkat realisasi anggaran.

Di sisi lain, realisasi belanja yang tidak mencapai 100 persen juga mencerminkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran, dimana belanja dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah. Namun demikian, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian, karena penyerapan anggaran yang rendah berpotensi mengurangi dampak terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar tingkat penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.



PENUTUP



BAB IV

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja, secara umum menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berada dalam kategori baik, dengan sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator seperti Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pelayanan Publik, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan capaian yang optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal, antara lain Indeks Infrastruktur Daerah, Persentase Kemiskinan, serta Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, serta percepatan transformasi digital pemerintahan. Selain itu, terdapat pula ketidakkonsistenan dalam perhitungan capaian pada beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan evaluasi kinerja ke depan agar lebih akurat dan akuntabel.

Secara keseluruhan, hasil capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program agar hasil yang dicapai lebih optimal dan merata. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa tantangan utama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ke depan adalah meningkatkan kualitas kinerja, bukan

sekadar capaian angka. Diperlukan pergeseran paradigma dari *output-oriented* menjadi *outcome-oriented*, serta penguatan integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Komitmen pimpinan daerah, konsistensi perangkat daerah, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.